

Kepuasan Pelaku Industri Terhadap Upaya Pembangunan Industri di Kabupaten Temanggung

R. C. Prihestiwi¹, S. Ma'rif²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 04 February 2020

Accepted: 02 February 2021

Available Online: 01 March 2021

Keywords:

Industry; Industrial Development Efforts; Satisfaction

Corresponding Author:

Rosa Calista Prihestiwi
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
Email: rosacalist@gmail.com

Abstract: *The industrial sector is considered capable of improving the community's economy. Temanggung Regency become superior industrial investment, this can be proven by the increasing number of industries, the contribution of the industrial sector to the economy of Temanggung Regency, and the number of workers in the industrial sector. Various industrial development efforts have been carried out by the Temanggung Regency Government in order to facilitate industrial activities in Temanggung Regency. Efforts that have been made is developing regions, developing industrial resources, developing industrial facilities and infrastructure, and licensing implementation. Therefore, the purpose of this research is to identify the satisfaction of industrial entrepreneur, who utilize industrial development efforts in Temanggung Regency. The data collection method is questionnaire, while the analytical method is the Customer Service Index (CSI) analysis to identify the level of satisfaction of industrial entrepreneur and the gap analysis to identify indicators of industrial development efforts that require improvement. The results of this reseacrh is the satisfaction of industrial entrepreneur on "satisfied" level with a value of 69.74%; but there are still indicators of industrial development that need to be improved, that are the sources of finance, the availability of assistance for industrial activities, and involvement in export assistance and promotion of industrial products.*

Copyright © 2019 TPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Prihestiwi, R. C., & Ma'rif, S. (2021). Kepuasan Pelaku Industri Terhadap Upaya Pembangunan Industri di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 10(1), 20–28.

1. PENDAHULUAN

Sektor perekonomian di Indonesia telah mengalami pergeseran, dari yang semula peranan sektor pertanian mendominasi, kini sektor industri mampu mendorong pergeseran struktur ekonomi dari perekonomian berbasis agraris menjadi perekonomian berbasis industri. Industri merupakan usaha pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan (Render & Heizer, 2001). Industri dinilai mampu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan keuntungan hasil pengolahan barang tersebut. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto Indonesia berdasarkan lapangan usaha tahun 2014 hingga 2019, sektor industri memainkan peran besar dalam perekonomian negara yaitu kontribusi paling tinggi dalam pembentukan struktur perekonomian Indonesia, yaitu dengan rata-rata sebesar 22%.

Melalui besarnya kontribusi sektor industri tersebut maka dapat diketahui bahwa sektor industri merupakan sektor yang penting sebagai penunjang perekonomian negara. Kontribusi sektor industri paling besar bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara berkembang lainnya (Chandra, 2003). Maka dari itu, pembangunan sektor industri selalu mendapat prioritas utama dalam perencanaan di negara-negara berkembang. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, penyelenggaraan perindustrian dilaksanakan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar penggerak perekonomian nasional, mewujudkan industri yang berdaya saing, membuka kesempatan berusaha dan perluasan

kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah, dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Pembangunan sektor industri disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri dalam melaksanakan kegiatan industri. Terdapat berbagai motivasi yang mendasari pelaku industri ingin melaksanakan kegiatan industri di suatu tempat, seperti perizinan yang cepat, perpajakan yang murah, keamanan yang terjamin, pasar, daya beli masyarakat setempat, ketersediaan sumberdaya alam yang diperlukan, ketersediaan sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang diperlukan, ketersediaan infrastruktur berupa jalan, listrik, dan telekomunikasi (Suryana, 2007). Bantuan pemerintah dalam membantu kelancaran kegiatan industri sangat penting. Maka dari itu munculah UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian" sebagaimana di atur dalam Undang-Undang. Rencana pembangunan industri kabupaten / kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional yaitu Kebijakan Industri Nasional paling sedikit meliputi (a) pengembangan perwilayahan industri; (b) pembangunan sumberdaya industri; (c) pembangunan sarana dan prasarana industri; (d) perizinan, penanaman modal bidang industri.

Pergeseran sektor pertanian menjadi sektor industri juga terjadi di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung menjadi primadona investasi, yang dapat dibuktikan terus meningkatnya jumlah industri dari tahun 2014 hingga tahun 2017, yaitu 15.813 unit usaha industri menjadi 15.840 unit industri Selain itu, kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan yaitu 26,47% pada tahun 2014 hingga pada tahun 2017 menjadi 27,05%. Sektor industri memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya pada tahun 2014 hingga tahun 2017 yaitu mencapai rata-rata 26,45%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa sektor industri berperan penting dalam pembentukan perekonomian masyarakat Kabupaten Temanggung. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan upaya pembangunan industri dalam rangka menjadikan Kabupaten Temanggung menjadi tempat terbaik untuk pelaksanaan kegiatan industri.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, masih terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan pelaku industri terhadap upaya pembangunan industri yang dilaksanakan. Pelaku industri masih merasakan kesulitan dalam kemudahan perizinan usaha karena memakan waktu yang lama, masih adanya ketergantungan impor bahan baku produksi, dan regulasi pemerintah yang berubah-ubah menjadi ancaman bagi pelaku industri di Kabupaten Temanggung (P5, 2015). Namun, setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, banyak hal yang diubah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan industri antarlain kebijakan perizinan satu pintu dan pengembangan sumberdaya manusia sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Melalui undang-undang tersebut, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat mengikuti upaya pembangunan industri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Upaya pembangunan industri yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu pengembangan perwilayahan, pengembangan sumberdaya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, dan penyelenggaraan perizinan. Semua upaya tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, menarik untuk dikaji bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melakukan pelayanan membantu kelancaran kegiatan industri berdasarkan tingkat kepuasan pelaku industri terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam pembangunan industri. Pentingnya mengukur tingkat kepuasan pelaku industri terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai dalam rangka membantu kelancaran kegiatan industri berdasarkan kebutuhan pelaku industri di Kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini akan dibahas sejauh mana upaya pembangunan industri oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu tolok ukur kepuasan pelaku industri di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku industri terhadap pelayanan dalam pembangunan industri yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kualitas pelayanan tidak dipandang

15.326 tenaga kerja terserap pada 32 buah perusahaan. Selain itu, industri kecil di Kabupaten Temanggung mencapai jumlah yang paling banyak yaitu 16.715 unit. Perkembangan industri dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas. Beberapa daerah landai di Kabupaten Temanggung memiliki aksesibilitas tinggi, sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan pelaku industri melaksanakan kegiatan industri di Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer dan individu sebagai unit analisa (Singarimbun & Effendi, 1995). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden. Kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku industri terhadap upaya pembangunan industri dengan penilaian harapan dan kenyataan yang diterima oleh pelaku industri. Kepuasan merupakan alat ukur untuk menentukan kualitas pelayanan (Ratminto, 2005), yaitu upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Selain itu, kualitas pelayanan tidak dipandang berdasarkan sudut pandang produsen namun persepsi orang yang menerima layanan tersebut tersebut (Tjiptono & Chandra, 2005).

Kuesioner yang digunakan mengacu pada parameter skala Likert yaitu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memiliki skala positif hingga negatif (Kusmayadi, 2000; Sugiyono, 2010). Kuesioner diajukan kepada 100 pelaku industri yang terdiri dari 5 pelaku industri besar, 7 pelaku industri menengah, dan 88 pelaku industri kecil yang melaksanakan kegiatan industri yang tersebar dalam 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Customer Service Index (CSI) untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku industri (Irawan, 2003) dan analisis kesenjangan untuk mengetahui indikator upaya pembangunan industri yang perlu diperbaiki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pembangunan industri yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu pengembangan perwilayahan, pengembangan sumberdaya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, dan penyelenggaraan perizinan dapat dilihat pada Tabel 1. Semua upaya tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Bentuk upaya pembangunan industri pengembangan kawasan peruntukkan industri dilakukan dengan pengembangan kawasan peruntukkan industri yang ditunjukkan indikator dengan kode 1 dan 2. Bentuk upaya pembangunan sumberdaya industri dilakukan dengan pembangunan sumberdaya manusia industri, penyaluran sumberdaya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, dan penyediaan sumber pembiayaan yang ditunjukkan indikator dengan kode 3 hingga 7. Bentuk upaya pembangunan sarana dan prasarana industri yang dilakukan dengan pengelolaan lingkungan, penyediaan lahan, jaringan air dan listrik dan jaringan transportasi yang ditunjukkan indikator dengan kode 8 hingga 14. Sedangkan bentuk upaya penyelenggaraan perizinan ditunjukkan indikator dengan kode 15.

Berdasarkan identifikasi upaya pembangunan industri yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dapat dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pelaku industri terhadap upaya pembangunan industri yang telah dilaksanakan. Penilaian kepuasan oleh pelaku industri dilakukan dengan menilai indikator-indikator upaya pembangunan industri yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan tabel indikator upaya pembangunan industri yang dinilai oleh pelaku industri (lihat Tabel 1).

Analisis Customer Satisfaction Index (CSI)

Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya dengan menggunakan metode *Customer Satisfaction Index* (CSI). Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku industri terhadap upaya pembangunan industri yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan melihat tingkat harapan dari indikator yang digunakan pada kuesioner. Untuk mengetahui kepuasan pelaku industri terhadap upaya pembangunan industri, dilakukan penyebaran kuesioner dengan responden sebanyak 100 orang yang terdiri dari pelaku industri besar, sedang dan kecil yang tersebar dalam 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Sehingga melalui analisis ini, dapat

diketahui seberapa tingkat kepuasan pelaku industri terhadap upaya pembangunan industri di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan pelaku industri yang dilakukan terhadap 100 responden adalah 69,74%, nilai indeks berada pada kisaran 66,00-80,99% yang masuk ke dalam kategori “puas”. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 1. Indikator Upaya Pembangunan Industri di Kabupaten Temanggung (Analisis, 2019)

Program Upaya Pembangunan Industri	Indikator	Kode
Penetapan kawasan peruntukkan industri besar, menengah, dan kecil dalam RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031	Pengetahuan mengenai informasi rencana tata ruang untuk kawasan peruntukkan industri	1
	Pelaksanaan pemanfaatan ruang kegiatan industri sesuai peruntukkannya	2
Pelibatan pelatihan kerja untuk menambah kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri	Pelibatan pelatihan kerja untuk menambah kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri	3
Penggunaan website kios 3 in 1 untuk meningkatkan kesempatan kerja dalam bidang industri	Penggunaan website kios 3 in 1 untuk meningkatkan kesempatan kerja dalam bidang industri	4
Pengujian peralatan perukaan Penyediaan jamsostek / program sejenis	Ketersediaan jamsostek / program sejenis dan pengujian peralatan industri	5
Penyediaan pelatihan dan bantuan alat untuk menunjang kegiatan industri	Ketersediaan bantuan alat kegiatan industri	6
Fasilitasi pertemuan antara penyalur KUR dengan pelaku industri Peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif / BUMDes	Kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri	7
Kewajiban kepemilikan dokumen AMDAL dan/atau UKL / UPL	Pelaksanaan pengelolaan lingkungan akibat kegiatan industri	8
Penetapan kawasan peruntukkan industri besar, menengah, dan kecil dalam RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031	Ketersediaan lahan kegiatan industri	9
Pembangunan sarana air bersih dengan PAMSIMAS dan PDAM	Ketersediaan jaringan air yang memadai yang dapat mengakomodir kegiatan industri	10
Penyediaan listrik oleh PT. PLN Diskon pembayaran tagihan listrik sebesar 30% untuk pemakaian listrik di Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) yaitu pukul 23.00 – 08.00 WIB	Ketersediaan jaringan listrik yang memadai yang dapat mengakomodir kegiatan industri	11
Peningkatan jalan usaha tani ke sumber-sumber bahan baku industri Perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa	Ketersediaan jaringan transportasi yang mendukung kegiatan industri	12
Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar sebagai sarana perdagangan untuk pemasaran produk industri	Ketersediaan sarana perdagangan untuk pemasaran produk industri	13
Penyelenggaraan bantuan ekspor dan promosi produk industri	Pelibatan dalam bantuan ekspor dan promosi produk industri	14
Penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu melalui <i>Online Single Submission</i>	Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memadai untuk melancarkan kegiatan industri	15

Berdasarkan perhitungan CSI di atas maka dapat diketahui bahwa pelaku industri merasa puas dengan upaya pembangunan industri yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kinerja upaya pembangunan industri telah memberikan kepuasan kepada pelaku industri. Berdasarkan hasil penelitian pengisian kuesioner terhadap 100 responden yaitu pelaku industri besar, sedang, dan kecil, maka dapat diketahui bahwa kinerja upaya pembangunan industri sudah sesuai dengan harapan pelaku industri. Namun, masih adanya beberapa upaya pembangunan industri yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung belum memuaskan pelaku industri.

Tabel 2. Perhitungan Kepuasan Pelaku Industri Kabupaten Temanggung (Analisis, 2019)

Kode	Indikator	MIS	WF	MSS	WS
1	Pengetahuan mengenai informasi rencana tata ruang untuk kawasan peruntukkan industri	2,29	4,40	2,27	9,98
2	Pelaksanaan pemanfaatan ruang kegiatan industri sesuai peruntukkannya	3,01	5,78	3,27	18,89
3	Pelibatan pelatihan kerja untuk menambah kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri	3,34	6,41	3,31	21,22
4	Penggunaan website kios 3 in 1 untuk meningkatkan kesempatan kerja dalam bidang industri	1,83	3,51	1,95	6,85
5	Ketersediaan jamsostek / program sejenis dan pengujian peralatan industri	2,16	4,15	2,7	11,19
6	Ketersediaan bantuan alat kegiatan industri	4,09	7,85	3,03	23,79
7	Kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri	4,72	9,06	2,87	26,00
8	Pelaksanaan pengelolaan lingkungan akibat kegiatan industri	3,62	6,95	4,09	28,42
9	Ketersediaan lahan kegiatan industri	3,82	7,33	4,25	31,16
10	Ketersediaan jaringan air yang memadai yang dapat mengakomodir kegiatan industri	3,80	7,29	3,92	28,42
11	Ketersediaan jaringan listrik yang memadai yang dapat mengakomodir kegiatan industri	4,04	7,75	4,13	32,03
12	Ketersediaan jaringan transportasi yang mendukung kegiatan industri	4,82	9,25	4,46	41,26
13	Ketersediaan sarana perdagangan untuk pemasaran produk industri	4,1	7,87	4,09	32,19
14	Pelibatan dalam bantuan ekspor dan promosi produk industri	4,34	8,33	3,45	28,74
15	Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memadai untuk melancarkan kegiatan industri	2,12	4,07	2,07	8,42
Total		52,1	100,00	49,86	348,72
Customer Satisfaction Index (CSI) = 69,74% (PUAS)					

Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan dilakukan untuk membandingkan harapan pelaku industri dengan kondisi ataupun kinerja upaya pembangunan industri yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Semakin besar nilai kesenjangan (gap) maka semakin besar pula kesenjangan yang terjadi antara kondisi eksisting dan harapan berdasarkan hasil kuesioner pelaku industri. Perhitungan kesenjangan penilaian upaya pembangunan industri oleh pelaku industri di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 3.

Setelah diketahui nilai harapan dan kenyataan yang diterima pelaku industri terhadap upaya pembangunan industri di Kabupaten Temanggung serta nilai kesenjangan, maka dapat diketahui rata-rata harapan dan kenyataan yang diterima pelaku industri. Rata-rata tersebut digunakan untuk menentukan indikator yang memerlukan perbaikan, di mana indikator yang memiliki nilai kesenjangan di atas rata-rata tidak memerlukan perbaikan dan indikator yang memiliki nilai kesenjangan di bawah rata-rata memerlukan perbaikan. Berdasarkan perhitungan kesenjangan, maka dapat diketahui rata-rata harapan sebesar 3,47 dan rata-rata kinerja sebesar 3,32. Selain itu, dapat diketahui pula rata-rata gap sebesar -0,15. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai kesenjangan lebih dari -0,15 yaitu ketersediaan bantuan alat kegiatan industri dengan nilai kesenjangan sebesar -1,06; kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri dengan nilai kesenjangan sebesar -1,85; dan pelibatan bantuan ekspor dan promosi produk industri dengan nilai kesenjangan -0,89 (lihat Tabel 4). Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang memerlukan perbaikan.

Tabel 3. Perhitungan Gap Berdasarkan Penilaian oleh Pelaku Industri Kabupaten Temanggung (Analisis, 2019)

Kode	Indikator	Harapan	Kinerja	GAP
1	Pengetahuan mengenai informasi rencana tata ruang untuk kawasan peruntukkan industri	2,29	2,27	-0,02
2	Pelaksanaan pemanfaatan ruang kegiatan industri sesuai peruntukkannya	3,01	3,27	0,26
3	Pelibatan pelatihan kerja untuk menambah kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri	3,34	3,31	-0,03
4	Penggunaan website kios 3 in 1 untuk meningkatkan kesempatan kerja dalam bidang industri	1,83	1,95	0,12
5	Ketersediaan jamsostek / program sejenis dan pengujian peralatan industri	2,16	2,7	0,54
6	Ketersediaan bantuan alat kegiatan industri	4,09	3,03	-1,06
7	Kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri	4,72	2,87	-1,85
8	Pelaksanaan pengelolaan lingkungan akibat kegiatan industri	3,62	4,09	0,47
9	Ketersediaan lahan kegiatan industri	3,82	4,25	0,43
10	Ketersediaan jaringan air yang memadai yang dapat mengakomodir kegiatan industri	3,8	3,92	0,12
11	Ketersediaan jaringan listrik yang memadai yang dapat mengakomodir kegiatan industri	4,04	4,13	0,09
12	Ketersediaan jaringan transportasi yang mendukung kegiatan industri	4,82	4,46	-0,36
13	Ketersediaan sarana perdagangan untuk pemasaran produk industri	4,1	4,09	-0,01
14	Pelibatan dalam bantuan ekspor dan promosi produk industri	4,34	3,45	-0,89
15	Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memadai untuk melancarkan kegiatan industri	2,12	2,07	-0,05
Rata – Rata		3,47	3,32	-0,15

Tabel 4. Urutan Prioritas Penanganan Indikator Upaya Pembangunan Industri di Kabupaten Temanggung (Analisis, 2019)

Urutan Penanganan	Indikator	Nilai Gap
1	Kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri	-1,85
2	Ketersediaan bantuan alat kegiatan industri	-1,06
3	Pelibatan bantuan ekspor dan promosi produk industri	-0,89

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka dapat diketahui bahwa terdapat indikator yang memiliki nilai kesenjangan lebih dari rata-rata. Indikator tersebut adalah kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri, ketersediaan bantuan alat kegiatan industri, dan pelibatan bantuan ekspor dan promosi produk industri. Maka dari itu, berikut ini merupakan rekomendasi upaya penanganan untuk masing-masing indikator.

Pertama, kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri. Akses sumber pembiayaan masih menjadi salah satu kesulitan bagi pelaku industri khususnya pelaku industri kecil dan menengah dalam melaksanakan kegiatan industri, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan (Murwanti, 2007; Ramkar, 2018; Rofiah, 2010). Perbaikan indikator ketersediaan lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dapat dilakukan melalui pembentukan BUMDes pada desa yang belum memiliki BUMDes, dan pengembangan unit usaha BUMDes berupa simpan pinjam untuk BUMDes yang belum memiliki unit usaha BUMDes. Penguatan unit usaha simpan pinjam BUMDes dapat dilakukan dengan sistem Bank Grameen (Yunus, 1999), yaitu peminjaman yang dilakukan dengan pembentukan kelompok simpan pinjam yaitu peminjaman uang sebagai tanggungjawab bersama secara kelompok, sehingga akan memunculkan rasa kepercayaan satu sama lain. BUMDes memiliki legalitas hukum dan aset-aset desa yang dapat dimanfaatkan untuk

peminjaman permodalan ke lembaga perbankan. Apabila tidak memungkinkan dibentuk BUMDes ataupun penambahan unit usaha simpan pinjam, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui organisasi masyarakat dapat membuat kelompok simpan pinjam yang terdiri dari beberapa pelaku industri. Pembentukan kelompok simpan pinjam diberi kemudahan legalitas yang dapat digunakan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui sosialisasi mudahnya penggunaan pelayanan perizinan Online Single Submission (OSS) dan atau pelaku industri dapat mengumpulkan agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan peminjaman permodalan ke lembaga perbankan. Penciptaan jejaring sosial antar pelaku industri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan permasalahan ketersediaan sumber pembiayaan yang mudah.

Kedua, ketersediaan bantuan alat kegiatan industri. Perbaikan indikator ketersediaan bantuan alat kegiatan industri dapat dilakukan dengan penyediaan modal yang mudah. Akses yang lebih luas yang dimaksud seperti perluasan untuk mengakses modal, sehingga pelaku industri dapat mengembangkan usahanya lebih mudah. Pemberdayaan masyarakat sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan (Noor, 2011). Penghilangan ketergantungan bantuan dan alat dengan kemudahan penyediaan modal, apabila modal keuangan sudah mudah maka untuk mendapatkan bantuan dan alat juga menjadi mudah. Selain itu, pelaku industri dapat meminta bantuan pemerintah desa untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyalurkan bantuan alat untuk mengembangkan industri kecil dan menengah, namun bantuan alat dapat dilakukan apabila industri berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Namun, tidak semua pelaku industri dapat merasakan bantuan alat, sehingga diperlukan pembentukan kemandirian pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan yang dapat diakomodir sendiri tanpa bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ketiga, bantuan promosi produk industri. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya meningkatkan pemasaran produk industri dengan mengadakan pameran, di mana pelaku industri dapat menampilkan produknya dalam pameran tersebut. Namun, masih ada pelaku industri yang merasa tidak mengalami peningkatan perekonomian dengan adanya kegiatan tersebut. Penanganan indikator bantuan promosi produk industri dapat dilakukan melalui bantuan pemasaran bukan hanya melalui pameran namun juga pembuatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dalam mendukung pemasaran produk-produk industri. Kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan dapat dilakukan dengan kewajiban pembelian produk industri khas Kabupaten Temanggung untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk acara-acara tertentu, kerjasama pembelian produk dengan cara substitusi dengan produk unggulan lain di luar Kabupaten Temanggung, pembinaan pelaku industri untuk memperluas pasar, serta pemanfaatan wisata yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai lokasi pemasaran produk industri khas Kabupaten Temanggung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan pelaku industri sebesar 69,74% yang masuk ke dalam kategori "puas", yang artinya kinerja upaya pembangunan industri sudah sesuai dengan harapan pelaku industri. Namun, masih adanya beberapa upaya pembangunan industri yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung belum memuaskan pelaku industri. Berdasarkan perhitungan kesenjangan, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga indikator yang memiliki nilai kesenjangan lebih dari rata-rata yaitu ketersediaan bantuan alat kegiatan industri dengan nilai kesenjangan sebesar -1,06; kemudahan mengakses sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan industri dengan nilai kesenjangan sebesar -1,85; dan pelibatan bantuan ekspor dan promosi produk industri dengan nilai kesenjangan -0,89. Ketiga indikator tersebut memerlukan perbaikan untuk menjadikan pembangunan industri di Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dari upaya yang telah dilaksanakan sekarang ini.

Perbaikan indikator ketersediaan lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dapat dilakukan melalui pembentukan BUMDes pada desa yang belum memiliki BUMDes, dan pengembangan unit usaha BUMDes berupa simpan pinjam untuk BUMDes yang belum memiliki unit usaha BUMDes. Perbaikan indikator

ketersediaan bantuan alat kegiatan industri dapat dilakukan dengan penyediaan modal yang mudah. Akses yang lebih luas yang dimaksud seperti perluasan untuk mengakses modal, sehingga pelaku industri dapat mengembangkan usahanya lebih mudah. Penanganan indikator bantuan promosi produk industri dapat dilakukan melalui bantuan pemasaran bukan hanya melalui pameran namun juga pembuatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dalam mendukung pemasaran produk-produk industri. Kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan dapat dilakukan dengan kewajiban pembelian produk industri khas Kabupaten Temanggung untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk acara-acara tertentu, kerjasama pembelian produk dengan cara substitusi dengan produk unggulan lain di luar Kabupaten Temanggung, pembinaan pelaku industri untuk memperluas pasar, serta pemanfaatan wisata yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai lokasi pemasaran produk industri khas Kabupaten Temanggung.

5. REFERENSI

- Chandra, R. (2003). *Industrialization and development in the Third World*. Routledge.
- Irawan, H. (2003). Prinsip-prinsip Kepuasan Pelanggan. *Elek Media Komputindo, Jakarta*.
- Kusmayadi, E. S. (2000). Metodologi penelitian dalam bidang kepariwisataan. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Murwanti, S. (2007). Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri, 300–309.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat, *I(2)*, 87–99.
- P5, U. (2015). Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif Produk Unggulan Kayu Olahan Kabupaten Temanggung.
- Ramkar, R. T. (2018). *Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro dan Kecil: Studi pada BMT Mustama Lembang*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ratminto, A. S. W. (2005). Manajemen pelayanan. *Jakarta: Pustaka Pelajar*.
- Render, B., & Heizer, J. (2001). Prinsip-prinsip manajemen operasi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Rofiah, K. (2010). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, 5(1)*, 1–22.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). Metode Penelitian Survai Edisi Revisi. *Jakarta: Lp3ES*.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode penelitian pendidikan. *Pendekatan Kuantitatif*.
- Suryana, A. S. (2007). *Iklim Investasi Daerah: Buku Panduan Untuk Membangun Iklim Investasi di Daerah*. Jakarta: KAS (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.)-GTZ-RED.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2005). Service, quality & satisfaction. *Yogyakarta: Andi Offset*.
- Yunus, M. (1999). The Grameen Bank. *Scientific American, 281(5)*, 114–119.